



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VI DPR RI DENGAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL RI**

- Tahun Sidang : 2023-2024
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 8 (Delapan)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Rabu, 13 September 2023
Waktu : 10.29 s.d 12.12 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt.1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : M. Sarmuji, S.E., M.Si.
(Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG)
- Acara : Pembahasan terkait:
1. Penyesuaian RKA/KL Tahun Anggaran 2024 (Sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran); dan
2. Lain-lain.
- Sekretaris Rapat : Dewi Resmini, S.E., M.Si.
(Kabag Sekretariat Komisi VI DPR RI)
- Hadir : **A. ANGGOTA DPR RI:**
38 dari 54 orang Anggota dengan rincian:
**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F- PDIP)**
9 dari 11 orang Anggota
1. Adisatrya Suryo Sulisto
2. Prof. Assc. Dr. Darmadi Duriyanto, S.E., M.B.A.
3. ST. Ananta Wahana, S.H.
4. Sonny T. Damaparamita
5. Ir. Deddy Yevri Hanteru Sitorus, M.A.
6. Dr. Evita Nursanty, M.Sc.
7. Sondang Tiar Debora Tampubolon
8. dr. H. Mufti A. N. Anam
9. Dr. Ir. Harris Turino, M.Si., M.M.
- 2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F- PG)**
-
- 6 dari 7 orang Anggota
-
1. M. Sarmuji, S.E., M.Si.
-
2. Gde Sumarjaya Linggih, S.E., M.A.P.
-
3. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
-
4. Doni Akbar, S.E., M.M.
-
5. Trifena M. Tinal, S.SC.
-
6. Nusron Wahid

3. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F- P. GERINDRA)

7 dari 8 orang Anggota

1. Mohammad Hekal, M.B.A.
2. Andre Rosiade
3. Khilmi
4. Ir. H. La Tinro La Tunrung
5. M. Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., MBA.
6. Hendrik Lewerissa, S.H., LL.M.
7. Mulan Jameela

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F- P. NASDEM)

4 dari 6 orang Anggota

1. Zuristyo Firmadata, S.E., M.M.
2. M. Syamsul Luthfi, S.E.
3. Rudi Hartono Bangun, S.E., M.A.P
4. H. Subardi, S.H., M.H.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F- PKB)

3 dari 5 orang Anggota

1. H. Nasim Khan
2. Siti Mukaromah, S.Ag., M.A.P.
3. H. Ali Ahmad

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. Ir.E. Herman Khaeron, M.Si.
2. Muslim SHI., M.M.
3. Hj. Melani Leimena Suharli
4. Dr. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Coom. M.Sc.

7. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F- PKS)

2 dari 4 orang Anggota

1. Amin AK, M.M.
2. Rafly Kande

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F- PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Eko Hendro Purnomo, S.Sos.
2. Hj. Intan Fauzi, SH., LL.M.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F- PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. H. Ach Baidowi, S.Sos., M.Si.

B. UNDANGAN/PEMERINTAH:

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI (Bahliil Lahadalia, S.E.) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.Si./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om swastiastu,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Yang terhormat dan selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI,
Pak Bahliil Lahadalia, beserta seluruh jajaran,

Puji syukur marilah kita haturkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa taala*, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua, hari ini bisa menghadiri Rapat Kerja dengan Menteri Investasi dalam keadaan sehat *wal afiat*.

Berdasarkan laporan Sekretariat, sudah kuorum fraksi, tapi belum kuorum anggota, izinkan saya membuka terlebih dahulu acara ini dan saya nyatakan terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.29 WIB)
(RAPAT DINYATAKAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Karena belum kuorum anggota, saya skorsing lima menit sambil *nunggu* tanda tangan-tanda tangan. Sudah ada yang di sini, *cuman* tanda tangannya belum *nyampe*. Nah, ini Pak Darmadi juga belum, Bu Evita juga belum, saya skorsing lima menit.

**(SKORS PUKUL 10.29 WIB)
(SKORS DICABUT PUKUL 10.32 WIB)**

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati,

Sesuai dengan agenda rapat kerja pada hari ini, sesuai undangan yang telah kami sampaikan, agenda rapat pada hari ini,

- pertama, untuk membahas penyesuaian RKA K/L tahun anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran,
- yang kedua, Lain-lain, kalau pun ada.

Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati,

Pada tanggal 4 September 2023, Komisi VI DPR RI telah menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-626/MK/02/2023 dan Menteri PPN/Bappenas Nomor B.644 dan

seterusnya, tanggal 31 Juli 2023 perihal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga tahun 2024 sebesar Rp1.226.376.670.000,00 untuk selanjutnya dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran DPR RI.

Kemudian berdasarkan surat Pimpinan Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11091 dan seterusnya, perihal Penyampaian Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024. Disampaikan hasil pembahasan belanja kementerian/lembaga sebagai bahan penyempurnaan RKA K/L di komisi dengan mitra kerjanya, dengan rincian alokasi anggaran belanja K/L tahun anggaran 2024, yaitu pagu anggaran Kementerian Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Tahun 2024 disepakati sebesar Rp1.229.295.942.000,00. Nilai tersebut bertambah dari anggaran yang diajukan sebelumnya, dikarenakan adanya perubahan terkait kenaikan gaji sebesar Rp2.919.272.000,0.

Selanjutnya, kami persilakan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM RI untuk menyampaikan tanggapannya terhadap penyesuaian RKA K/L tahun anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI.

Sebelumnya, kami ingin kesepakatan waktu, sampai jam 11.30? 11.30 sementara ya?

(KETUK PALU 1 KALI)

Kami persilakan, Pak Menteri, tanggapannya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,*

Yang saya hormati Pimpinan sidang tunggal dan seluruh Bapak-Ibu Anggota Dewan Komisi VI yang saya hormati,
Teman-teman dari Kementerian Investasi,
Pimpinan dan Bapak-Ibu semua, Anggota Komisi VI yang saya hormati,

Karena agenda rapat kita hari ini dua, yaitu penyampaian terhadap hasil pembahasan di Badan Anggaran, kami prinsipnya tidak bisa lagi untuk menyampaikan pandangan lain, kami menyetujui *aja*, karena kalau rakyat udah mengatakan begitu, siapa lagi yang kami harus dengar *kan?* Saya sebagai Menteri cuma mau dengar Pak Presiden Jokowi sama Anggota DPR. Dan karena sudah diputuskan, saya *sami'na wa atho'na*. Karena itu, Pimpinan, tidak ada tambahan lain, saya, terima kasih, Pimpinan. Hanya itu saja.

Makasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Karena waktu kita, juga harus percepat soalnya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Menteri.
Dengan tanggapan Pak Menteri, kita bisa sepakati ya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pimpinan, mohon maaf, Pimpinan, ada catatan ya, Pimpinan, ya, mohon maaf.

Tolong ini menjadi satu kesimpulan dalam rapat ini agar serius, bahwa dengan persetujuan anggaran 1,2 triliun sekian, artinya anggaran yang kami ajukan untuk OSS itu tidak disetujui. Maka saya minta kepada seluruh Komisi VI, juga pada saat saya rapat-rapat nanti, tolong jangan ekspektasinya tinggi terhadap pelayanan OSS, ini penting *nih*. Karena OSS, harapannya teman-teman dan publik itu *kan* harus bagus. Saya kemarin dalam rapat kemarin saya sudah mengibaratkan seperti mobil Mercy, lari kecepatan 160 nyaman dan tenang. Kalau sekarang OSS kita ini seperti Avanza, Avanza pun *second*, yang lari kalau 160 itu pasti jatuh dari tol. Jadi itu *aja*, artinya mohon maklum *gitu loh*, jangan sampai *dikirain* Menteri Investasi *enggak* becus, apalagi Pak Prof. Darmadi jangan sampai bilang, ini Menteri Investasi kerjanya apa, *gitu kan*. Aku *enggak* mau juga dibilang *gitu, gitu loh*, jadi harus seimbang.

Itu *aja*, Pimpinan, yang lain-lainnya oke, *sami'na wa atho'na*.
Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, karena sudah ada tanggapan dari Menteri Investasi dan sudah ada harmonisasi ditingkat Badan Anggaran, dan sulit sekali untuk mengubah lagi, menambah, maupun mengurangi. Kita putuskan ya? Kita setuju pagu anggaran untuk Kementerian Investasi seperti yang sudah diputuskan oleh Badan Anggaran.

(KETUK PALU 1 KALI)

Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu,

Agenda satu sudah selesai, sekarang agenda lain-lain. Pasti Pak Menteri tidak menyampaikan yang lain-lain, tapi Anggota pasti ingin menyampaikan yang lain-lain.

Jadi kami persilakan kepada Anggota untuk menyampaikan kepada Kementerian Investasi tentang *concern*-nya masing-masing. Mudah-mudahan tidak banyak, Pak Menteri, mudah-mudahan. Kesempatan pertama, Pak Subardi, *monggo*.

F- P. NASDEM (H. SUBARDI, S.H., M.H.):

Baik, terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan,

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI,
Pak Menteri BKPM dan beserta Kementerian Investasi, dan jajarannya semuanya, yang kami banggakan,

Terima kasih atas apa penyampaian Pak Menteri yang singkat, padat, dan langsung diterima, soal ini, materi ini. Berkaitan dengan lain-lain, saya ingin mencoba minta penjelasan dari Pak Menteri. Yang sekarang baru heboh ya soal Pulau Rempang, ini menarik ini. *Nah*, saya sebenarnya apresiasi ya, apresiasi apa yang telah dilakukan Pak Menteri di dalam rangka membangun investasi di negeri kita, sehingga ke depan punya prospek yang bagus di dalam perekonomian kita. Namun demikian dalam investasi tentunya harus melihat dari kaidah-kaidah yang ada. *Nah*, khususnya Rempang, itu *kan* kalau tidak salah ada nama Kampung Lama atau apa ya namanya, ya, menurut saya dengar itu, itu adalah sebuah kampung yang merupakan cikal-bakal ya, cikal-bakal itu sebelum Batam itu berkembang, kampung itu *udah* ada manusianya, di situlah manusia pertama. *Nah*, sehingga saat ini terjadi gejolak, terjadi gejolak. *Nah*, oleh karena itu sebagai Menteri Investasi yang tentunya mempunyai tanggung jawab terdepan di dalam rangka pembangunan itu, kami mohon agar bagaimana penyelesaian itu *core*-nya adalah rakyat. Jangan sampai ada keributan, tapi rakyat bisa menikmati daripada investasi itu, investasi yang ditanamkan yang menumbuhkan ekonomi lokal maupun nasional, *nah*, itu bisa dinikmati oleh rakyat.

Nah, karena itu sudah muncul atau *udah* apa *tuh*, menjadi persoalan publik ya dan sudah viral dan sebagainya, dan *udah* terjadi bentrok, dan lain sebagainya. *Nah*, kami mohon Pak Menteri, buka-buka *aja dah*, *udah* dibuka *aja*, artinya supaya apa, biar masyarakat tahu, sehingga duduk, duduk persoalannya *kayak* apa, masyarakat harus yang, yang merasa dia punya mulai nilai budaya, nilai kultural itu atau nilai-nilai lahan adatnya, dan sebagainya, itu bisa mereda, sehingga tentunya kita tidak bisa lepas hanya sebatas dengan suatu kekerasan, tapi bagaimana pendekatan persuasif, rakyat juga bisa terima, investasi juga bisa jalan. Karena investor itu tidak akan jalan ketika tidak bergandengan tangan dengan rakyat, dengan masyarakat.

Nah, oleh karena itu kami berharap, Pak investasi, eh Pak Menteri Investasi itu bagaimana, apakah itu persoalan-persoalan ada di daerah, atau apakah ada, ada di masyarakat, apakah ada di investor? Saya kira Pak Menteri lah yang buka, nanti tolong disampaikan, agar nanti diselesaikan tuntas. Karena saya melihat Pulau Batam atau Kepri ini punya potensi yang besar, ini baru salah satu pulau, belum pulau yang lain, pulau yang lain, pulau yang lain. Karena peletak strategisnya, Pulau Batam ini. *Nah*, tentunya ketika Rempang diselesaikan dengan kondusif, dengan tuntas, maka investor pun akan berdatangan jauh lebih banyak daripada saat ini. Kemudian rakyat pun bisa akan menikmati apa yang diperoleh dari investasi itu, tidak hanya sebatas berontak, demo, dan bahkan kekerasan. *Nah*, mohon Pak Menteri bisa dijelaskan, buka saja, kita ini semua wakil rakyat sehingga kita bisa menganalisis dan bisa melangkah lebih lanjut sebagai fungsi dan wewenang kita.

Mungkin itu saja. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Subardi.
Selanjutnya Bu Evita.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati,

Tadi Pak Menteri mengatakan jangan senggol OSS ya, Pak, ya? Justru baru saya mau *nyenggol* itu sebenarnya, *gitu*.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Karena,

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Bukan *nyenggol*-nya yang buruknya, bukan, saya justru mendukung program dari,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Kalau yang baik-baik, *enggak* apa-apa, yang penting jangan tanya yang tidak baiknya, karena itu berbanding lurus dengan anggaran *gitu*.

F- PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.):

Saya justru merasakan, Pak Menteri, bahwa pentingnya OSS ini segera difinalisasikan. Saya *enggak ngerti* anggarannya apakah ini terhambat dengan anggaran saja, apakah juga terkait ESDM, karena kalau dengar *statement*-nya Pak Luhut *kan* dibangun dari kubur Steve Jobs, apa, Steve Jobs pun, si ini pun *enggak* bakal selesai, *nah*, ini apa *sih* masalahnya sebenarnya.

Terus mungkin kalau dari aspek anggaran, Pak, kemarin waktu kita bahas anggaran, itu untuk data, apa, Menkop 400 miliar, Perdagangan ada juga 400 miliar, jadi tidak sinergi. Kalau memang semuanya mau di *pool* di OSS, *kenapa* anggaran-anggaran yang di departemen lain itu tidak di *pool*-kan *aja*? Karena bukan anggaran kecil *loh*, yang mereka sudah disetujui untuk itu, Pak. Kemarin waktu rapat saya sudah pertanyakan, mereka juga mengajukan dan juga disepakati. Harusnya semuanya di *pool* saja di BKPM, untuk penyelesaian daripada OSS ini begitu, Pak. Dan ini kalau kita bicara apa namanya, *monitoring* dengan melakukan pengawasan terhadap perkembangan daripada usaha terutama usaha mikro ya, Pak, ya, usaha UMKM, ya harus ada data-data yang akurat gitu Pak. Jadi keberadaan OSS ini menurut saya, sangat penting dan dicari solusinya agar bisa diselesaikan dengan segera.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Bu Evita.

Selanjutnya, Pak Andre Rosiade.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Baik terima kasih Pak Sarmuji yang baik hati, Pimpinan, kami.

Pak Menteri, terlihat capek dan lelah mukanya, karena baru pulang nonton bola tadi malam, teriak-teriak terus Pak Menteri, ternyata. Di stadion kita melihat bagaimana Pak Bahlil itu teriak-teriak terus, ternyata *full trust* Garuda ternyata Pak Bahlil ya.

Jadi pertama, saya sama dengan Pak apa namanya, saya rasa seluruh Anggota DPR di Komisi VI ini juga punya pertanyaan yang sama, dalam arti kata kita pasti mendukung investasi, Pak Bahlil. Kita mendukung investasi, saya bicara *dua nih*, satu, Rempang dulu. Kita pasti mendukung investasi itu, karena kita tahu dengan investasi masuk, *Insya Allah* akan ada nilai tambah. Itu kan pasir kuarsa, ya Pak Bahlil? Ya pasti akan ada nilai tambah, berapa kali lipat nanti nilai tambahnya, Pak Bahlil? 10 sampai 20 kali ya? Ya kita dukung kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi. Dan saya juga sudah membaca keterangan bahwa sebenarnya Pemerintah Pak Jokowi sudah punya solusi yang terbaik. Bahwa ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa sebenarnya Pemerintah Presiden Jokowi sudah punya kebijakan yang sangat adil bagi masyarakat. Saya baca bahwa presiden sudah menyatakan bahwa sudah menyiapkan rumah tipe 45 dengan harga pembangunan Rp120 juta, *plus* tanah 500 meter persegi dan bersertifikat untuk warga, itu satu ya, Pak Bahlil. Yang kedua, selama rumah belum selesai, selama sertifikat tanah belum diserahkan, pemerintah memberikan uang kontrak rumah per KK Rp1 juta, betul Pak Bahlil? Lalu ada uang tunggu Rp1,030 juta per bulan, per kepala, bukan per KK, per kepala. Menurut saya, ini sudah *win-win* yang baik bagi pemerintah. Pemerintah membutuhkan investasi, tapi pemerintah tidak melupakan aspirasi rakyat, pemerintah tidak menelantarkan rakyat.

Nah, lalu saya juga baca 50% sudah menerima warganya, tinggal 50% lagi yang masih butuh dikomunikasikan. *Nah*, dan saya juga sudah baca, kemarin Presiden di Cilegon sudah menyampaikan bahwa mengutus langsung Pak Bahlil untuk turun ke lapangan, betul *kan*? *Nah*, saya minta permasalahan ini bisa segera selesai, Pak Bahlil. Saya percaya, Pak Bahlil *kan* pidato 12 Agustus di Batam. Saya ini juga, Ibu saya buruh tukang cuci, Bapak saya buruh bangunan, saya dari bawah, saya mengerti perasaan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. *Kan* itu saya baca video Pak Bahlil di BP Batam. *Nah*, untuk itu, sebagai mitra Pak Bahlil saya meminta Pak Bahlil segera besok datang ke Rempang ya, sesuai perintah Presiden, berkomunikasi dengan bahasa rakyat, selesaikan ini segera, bahwa kita butuh investasi tapi pemerintah tidak mungkin menelantarkan rakyat. Ini harapan kami, kami mendengar aspirasi masyarakat, Pak Bahlil, kami mendengar ratapan masyarakat. Untuk itu saya pun mendengar bahwa pemerintah punya solusi yang terbaik, tinggal komunikasi yang agak lemah. Untuk itu saya rasa presiden sudah tepat mengutus Pak Bahlil, karena Pak Bahlil dari rakyat dan kembali untuk rakyat. Jadi saya tunggu Pak Bahlil segera besok datang ke Rempang dan segera laporkan kepada kami, Pak Bahlil, hasil kunjungan Pak Bahlil ke Rempang menyelesaikan masalah. Karena kita menunggu langkah konkret pemerintah menyelesaikan, itu satu. Jadi kita dukung dan kita tunggu ya.

Yang kedua, Pak Bahlil, saya ini Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Daerah Pemilihan Sumatera Barat. Ada permasalahan,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Dari mana, dari mana, wilayah yang mana?

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Sumatera Barat.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Bukan DKI Jakarta ya?

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Bukan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oh iya jelas itu, nomor berapa?

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kalau nomor *Insyah Allah*, Pak Bahlil, *Insyah Allah*, nomor satu. *Insyah Allah*, suara terbanyak, *Insyah Allah*. Ini penting, Pak Bahlil. Beberapa bulan yang lalu saya sengaja tidak berkomentar di media, Pak Bahlil, soal demonstrasi Air Bangis, ya. Bagaimana ribuan masyarakat Air Bangis dari Pasaman Barat datang ke Kota Padang, ingin menemui Gubernur Sumatera Barat, tapi gubernur *enggak* punya nyali dalam tanda kutip, waktu itu menemui warganya, ya. Saya sengaja tidak berkomentar di media, karena apa? Saya tidak ingin dituduh menunggangi ya, karena sedikit-sedikit masalah di Sumatera Barat itu, sedikit-sedikit yang dituduh pasti Andre pelakunya, apalagi kalau negatif terhadap gubernurnya. Padahal saya juga *enggak* perlu *ngapa-ngapain* juga, gubernur *enggak* kerja apa-apa. Tapi saya juga dituduh.

Nah, sekarang saya menggunakan hak konstitusi saya, bicara dengan Menteri Investasi, di ruang Anggota ruang Komisi VI ini, saya menggunakan hak konstitusi. Saya *nanya* ama Pak Bahlil, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengajukan PSN untuk Air Bangis. Pertanyaan saya satu, Pak Bahlil, apakah pemerintah sudah menyetujui itu masuk dalam PSN? Pengajuan surat dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apakah pemerintah pusat sudah menyetujui ada pembangunan *refinery* di Sumatera Barat di Air Bangis Pasaman Barat itu sudah disetujui tidak oleh pemerintah pusat masuk dalam PSN? Itu satu, ya. Dan saya minta jawabannya, jangan tertulis, Pak Bahlil, karena rekaman Pak Bahlil ditunggu oleh masyarakat Sumatera Barat.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Karena jawaban saya akan menaikkan elektabilitas Pak Andre.

F -P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Bukan, ini aspirasi rakyat, itu satu.

Yang kedua, Pak Bahlil, investasinya dilakukan oleh PT Abaco, Abaco tulisannya. Kantor PT Abaco itu adalah gedung yang sama, sebelum Pak Bahlil pindahkan Sekretariat HIPMI di gedung itu ke gedung yang baru. Kantor lama, iya kantor lama kita, sekretariat di situ. Pak Bahlil punya sejarah itu di kantor itu, sebelum Pak Bahlil jadi Ketum HIPMI. *Nah*, saya minta Pak Bahlil sampaikan pada kami, PT Abaco itu apakah *bonafide* atau tidak? Karena *gini*, Pak Bahlil, agak menarik. Untuk PSN ini, pemerintah provinsi menyiapkan lahan 30 ribu hektar, padahal, Pak Bahlil, Presiden Jokowi bersama Pak Bahlil baru hari Selasa yang lalu saya lihat ke Cilegon, sebelum Pak Bahlil berangkat ke Solo nonton bola bareng saya, Pak Bahlil ke Cilegon bersama Presiden, betul? Itu tanah yang dibutuhkan pihak Lotte itu, bangun *refinery* kan persis mirip-mirip itu *kan*, itu hanya 110 hektar. Ini mintanya 30 ribu hektar, masuk akal *enggak*, 30 ribu hektar mintanya, Pak Bahlil? *Nah*, saya minta, ya, kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM, jelaskan kepada kami. Saya ingin di ruangan ini kita mendengar keterangan Menteri Investasi, karena jutaan masyarakat Sumatera Barat ingin mendengarkan sikap resmi pemerintah, apakah ini sudah disetujui PSN atau belum? Satu. Yang kedua, Abaco itu *bonafide enggak, gitu loh*. Jangan sampai nanti hanya sekedar orang rebutan kebun kelapa sawit, Pak Bahlil, karena ada 30 ribu hektar, Pak Bahlil. Apalagi saya lihat *enggak* ada *refinery* mana yang butuh 30 ribu hektar? Bahkan yang Pak Bahlil tinjau dengan Presiden saja kemarin hari Selasa, di mana Pak Bahlil akan diinstruksikan oleh Presiden untuk ke Rempang, di Cilegon itu, hanya 110 hektar.

Terima kasih, Pak Bahlil, saya tunggu jawaban resminya.
Terima kasih, Pak Sarmuji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Makasih, Pak Andre.

Selanjutnya Pak, Pak Darmadi.

F- PDIP (PROF (ASSC) DR. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Terima kasih, Pak Sarmuji, Pimpinan.

Pak Bahlil dan jajarannya,

Nama saya Darmadi Durianto, Dapil DKI III, Fraksi PDI Perjuangan, nomor sama kayak Andre.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

...Kalah *dong* sama Prof.

F- PDIP (PROF (ASSC) DR. DARMADI DURIANTO, S.E., M.B.A.):

Itu, Pak Menteri, saya sangat apresiasi capaian Pak Bahlil, investasi selalu tercapai, 900 ke 1.200 kadang ke 1.400. Sebaran juga bagus, ya, antara Jawa dan non Jawa bagus, ya. Hanya ada pertanyaan, Pak Menteri, pertanyaannya adalah bahwa biaya investasi kita tinggi, Pak Menteri, itu salah satu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita *enggak* bisa ke 6%. Kompas hari ini menulis, stagnasi pertumbuhan ekonomi, yang hanya ada di 5%, ya. Lembaga ekonomi kita boros, jadi sangat boros, *enggak* efisien. Bahkan Acemoğlu mengatakan, parasitik, itu parasitik, parasit, Pak. Itu penyebab biaya investasi masih tinggi. Andai kata saja biaya investasi ini bisa diturunkan maka pertumbuhan ekonomi akan naik ke 6%. Itu dilihat dari angka ICOR, Pak. ICOR kita ini masih 7,6, tahun 2021, 8, masih, dibanding negara-negara ASEAN kita ini tinggi *banget*, Pak Bahlil, ya, Kamboja, Filipina, Vietnam ya, 2021 ke 2022 7,6.

Jadi andai kata ini bisa kita samakan dengan negara-negara ASEAN saja, maka pertumbuhan ekonomi kita akan naik, Pak Menteri. *Nah*, ini tentu catatan kita dari Fraksi PDI Perjuangan, mohon Pak Bahlil bisa menjelaskan kepada kami, apa langkah yang bisa dilakukan untuk menurunkan ICOR, *gitu*. Kalau bisa ke lima *aja*, Pak Menteri, *wah* luar biasa, ini adalah salah satu poin yang harus Pak Menteri kerjakan sebelum tahun depan berakhir. Pak Menteri *kan*, Bahlil *kan* bisa aja jadi wapres, *kan*, ya, *kan* bisa *aja kan*. Ini *kan* kita kaget-kaget sekarang ini, Pak, ya, pental sana, pental sini, *kan* ya, jadi tiba-tiba Pak Bahlil bisa jadi wapres, *wah* luar biasa *kan*, jadi itu yang pertama.

Yang kedua adalah saya melihat ada kemajuan besar dari NIB, waktu presentasi mungkin beberapa bulan yang lalu itu baru 2 jutaan, Pak, mikronya, mikronya Pak. Sekarang *udah* 5.535.606, luar biasa, Pak, capaiannya, luar biasa dari 2 juta ke 5 juta lebih. Ini mungkin ada kaitan dengan anggaran juga ya, Pak, ya. Kalau ini anggarannya *enggak* besar, nanti pertumbuhannya juga *enggak* besar ya, Pak, ya? Tetapi *kan* total mikro itu *kan* total UMKM *kan* 65 juta lebih, padahal mikronya berarti kalau 97% *tuh* masih ada sekitar 60 juta. Lima juta ke 60 juta ini, masih jauh, Pak, ya. Kalau saya turun ke dapil saya di Jakarta saja, ibu kota, Pak, kalau ditanya NIB ada *enggak*? UMKM itu, *enggak* ada, Pak, jawabannya, Pak. Berarti masih banyak *gap*-nya. *Nah*, ya berarti sosialisasi agak kurang, Pak Menteri, ya, karena kita harus per, kita giatkan sosialisasi itu agar bisa bertambah terus jumlah yang mikro ini, Pak Menteri.

Nah, tentu saja kita berharap strategi apalagi yang harus dilakukan oleh Pak Menteri, agar ini bisa lebih cepat, Pak, ya, sehingga di akhir 2024 pas Oktober, Pak Menteri, ya, ini bisa mencapai kurang lebih kalau bisa 15 juta *udah* bagus, Pak Menteri ya. Lima belas juta *aja*, Pak, ya, di akhir 2024. Ini harapan kita supaya ini lebih bagus, lebih cepat pergerakannya. *Nah*, itu adalah poin kedua.

Poin ketiga yang saya harus selalu saya sorot adalah apakah investasi ini selalu berkaitan dengan penambahan lapangan kerja, Pak? Karena berbagai data menunjukkan, penambahan lapangan kerja itu tidak signifikan dengan kenaikan dari 900 ke 1.200. Ini *kenapa nih*, Pak Menteri, apa ada gejala apa *gitu*, sehingga tidak terlalu signifikan padahal investasinya naiknya sangat banyak, Pak Menteri, ya. Kita mengakui bahwa sumbangsih investasi yang naik ini turut serta mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan penjualan. Tetapi memang kita harus akui di Pemerintahan Jokowi ini bahwa kita masih stagnasi, tidak bergerak ke angka lebih dari lima, ada jebakan di sana, Pak, ada jebakan. Padahal kita *pingin* menuju ke Indonesia Emas, Pak, 2045. Jangan sampai Indonesia Emas menjadi Indonesia

Cemas, ya, ini bahaya sekali *gitu*. Jadi apa yang bisa dikerjakan, supaya kita bisa menatap Indonesia Emas 2045, bisa tercapai kita menjadi negara lima besar ekonomi dunia, Pak Bahlil.

Jadi itu harapan kami, saya, mudah-mudahan Pak Menteri bisa memberikan arahan, ya, atau pencerahan kepada kami.

Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih, Prof Pak Darmadi.

Selanjutnya, Pak Harris Turino.

F- PDIP (Dr. Ir. HARRIS TURINO, S.H., M.Si., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Yang terhormat Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi VI,
Yang terhormat Pak Bahlil Lahadalia beserta seluruh jajarannya,

Yang pertama, terkait dengan investasi di Batam, tentu saya mengapresiasi masuknya satu investasi asing dalam jumlah jumbo. Di berbagai media, Pak Bahlil mengatakan bahwa untuk tahap awal sekitar 175 triliun dan bahkan nantinya bisa akan mencapai ke 361 triliun, ini untuk *membikin* pabrik kaca dan solar panel terbesar nomor dua di dunia. Jadi harapannya, investasi ini akan meningkatkan GDP, menciptakan lapangan kerja, Pak Bahlil katakan ada 17.500 bahkan sampai ke 35.000 lapangan kerja akan tercipta, yang pada gilirannya adalah kesejahteraan rakyat.

Saya menyadari, Pak Bahlil, masuknya investasi ini tidak *membikin* semua pihak bahagia. Pihak-pihak di luar negeri, Singapura maupun negara-negara lain, melihat ini juga sebagai ancaman. Maka saya lihat bahwa banyak sekali pihak yang bermain, yang juga berusaha untuk mencegah terjadinya investasi ini. Harapannya adalah Indonesia tetap tidak layak investasi dan akibatnya Indonesia tetap akan menjadi negara berkembang, ini di satu sisi.

Tetapi di sisi yang lain, ada juga satu realitas, bahwa masuknya investasi ini mengakibatkan ada 16 perkampungan tua yang memang tergusur dari akar budayanya. *Nah*, ini yang harus menjadi perhatian dari Menteri Investasi. Karena bagaimana pun juga, perkampungan-perkampungan tua ini tentu sudah ada jauh lama sebelum adanya bahkan BP Batam. Ini menimbulkan penolakan dari warga Rempang dan akhirnya menimbulkan gejolak yang lebih besar, melibatkan banyak warga Melayu, rakyat berhadapan dengan aparat dan akibatnya adalah banyak yang terluka.

Maka dari itu, kaitannya dengan investasi ini, saya berharap Pak Bahlil sesuai dengan arahan presiden, memang harus segera terjun ke sana, Pak. Menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya, melakukan sosialisasi kepada warga dengan sebaik-baiknya, sehingga eksese negatif dari investasi ini bisa dicegah. Paling tidak, kehadiran Pak Bahlil, harapannya adalah semua warga yang saat ini ditahan oleh aparat keamanan, itu bisa dilepaskan. Karena warga memperjuangkan haknya dan warga-warga yang terluka juga bisa diobati atas biaya dari

negara. Untuk warga-warga di 16 perkampungan tua, harapannya perlakuannya berbeda dengan warga-warga pendatang baru yang juga berkepentingan, karena dia juga tergusur dari investasi ini. Sehingga ada perlakuan berbeda yang lebih *fair*, yang lebih beradab, terhadap warga-warga asli dari 16 perkampungan tua. Dan seperti dikatakan Pak Andre tadi, mungkin ini bisa dilaporkan hasilnya kepada kami yang ada di Komisi VI. Pada siang hari nanti kita juga akan bertemu dengan Kepala BP Batam dan kita juga akan minta bahwa BP Batam juga berperan. Jangan semata-mata hanya investasi saja, yang kemudian merugikan masyarakat, ini yang pertama, tentang Rempang.

Yang kedua, Pak Bahlil, janji Pak Bahlil untuk memaparkan investasi di dapil saya, ini masih tetap saya tagih, Pak Bahlil. Dan ada masukan yang bagus sekali dari masyarakat di dapil, terutama Kabupaten Tegal dan Brebes. Setiap izin investasi baru di Kabupaten Tegal dan Brebes harapannya adalah menggunakan tenaga kerja lokal laki-laki dan perempuan, karena banyak sekali pengangguran laki-laki di Kabupaten Tegal dan Brebes, yang diterima hanya pekerja perempuan. Sehingga ini menjadi satu masukan, Pak Bahlil, agar ke depannya, dari awal sebelum mereka masuk, sudah bisa ditata sehingga memang penciptaan lapangan kerja terjadi di dapil Jawa Tengah IX Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes.

Makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Walaikumsalam,

Terima kasih, Pak Harris.

Selanjutnya, Pak Ananta Wahana.

F- PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Terima kasih.

Pak Sarmuji, Pimpinan Komisi VI beserta Anggota Komisi VI.
Pak Menteri, Pak Bahlil yang saya hormati beserta jajaran,

Pak Menteri ini sudah saya tanyakan ketujuh kalinya, tetapi ke staf Bapak. Ketika kami melakukan sosialisasi BKPM di beberapa apa namanya, daerah di dapil kami. Dan memang di Banten, Pak Menteri, Pak Menteri terkenal sebagai jagoan investasi. Bahkan kalau di sana, sampaikan, ini jawarnya investasi itu Pak Bahlil *gitu kan*, itu, itu, di Banten disampaikan seperti itu. Karena tadi juga disampaikan, target yang diberikan oleh, oleh Presiden selalu terlampaui. Itu, itu diakui. *Nah*, dan yang luar biasa nasionalismenya cukup tinggi karena bisa menggeser, awalnya pembangunan ini Jakartasentris, Jawasentris menjadi Indonesiasentris. Tetapi, Pak Menteri, daerah yang tidak jauh dari Jakarta, itu terjadi kesenjangan yang luar biasa, di Banten. Di Banten ini, antara Banten Selatan dan Banten Utara, ini luar biasa kesenjangan. Di Banten Selatan itu, Pak, investasi PMA itu 1,6%, kemudian PMDN-nya hanya 12,6%, kalau *enggak* salah itu, Pak Menteri. Sementara di Tangerang Raya itu 80%, 78,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pak, mohon maaf. Banten Selatan itu kabupaten apa *aja*, Pak? Mohon maaf.

F- PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Lebak dan Pandeglang.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oke.

F- PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Lebak dan Pandeglang, dan pada saat itu ditulis itu, Pak, di Max Havelaar itu *kan*, tentang penindasan di sana. *Nah*, sehingga jagoan investasi itu kami berharap hadir di tempat kami dan bisa membuat suasana di Banten ini ada keseimbangan. Karena *jomplangnya* luar biasa, bayangkan kalau hanya 1,6%, kemudian PMDN-nya 12,6%, *jomplang* sekali, sehingga di sana, Pak, harus diakui, kalau Banten Selatan, Rangkas, itu sejahtera, nusantara sejahtera, Pak. Itu sudah mitosnya demikian, ini yang perlu saya sampaikan.

Juga kalau kami hitung, Pak, jadi industri di sana itu hanya 13 dan 42, jadi *kan* tadi saya ngomong Lebak dan Pandeglang, jadi itu hanya berapa, 60-an, sementara Tangerang ini 2.700 industri, sehingga saya mohon ini bisa digeser karena *gap*-nya terlalu, terlalu tinggi sekali dan itu hanya se-kedipan mata dari Jakarta, ini yang, yang pertama, Pak. Kami berharap, dan itu rakyat Banten berharap, sehingga kami sosialisasinya itu, saya, saya fokuskan di daerah itu, daerah-daerah yang kering, daerah-daerah yang miskin, Pak, terima kasih tentang hal itu.

Kemudian yang kedua, pidato Presiden tanggal 16 Agustus di depan kita ini juga menarik, persoalan hilirisasi. Karena *kan* disampaikan, kita punya sumber, sumber alam yang banyak, *enggak*, itu tidak akan mengubah apa-apa kalau tidak dibudayakan. Sehingga hilirisasi itu dan ternyata ya benar, catatan kemarin disampaikan, kalau dari 2,1 miliar USD kemudian bisa bergerak menjadi 33,8 miliar USD, ini kan berlipat-lipat. Tetapi, Pak, *anu*, sumber nikel di Sulawesi Tenggara atau Maluku itu ternyata juga belum bisa menggerakkan kesejahteraan *gitu*. Bahkan di dua tempat itu, kenaikan kemiskinannya naik, ya, jadi kemiskinannya di sana naik, meskipun hanya beberapa. Kalau *enggak* salah dari 11,27% menjadi 11,43%, kemudian 6,37% menjadi 6,45%. Tetapi ini kan artinya kehadiran hilirisasi di sana belum menggerakkan kesejahteraan masyarakat di sana, sehingga kami berharap itu. Kalau kita *ngomong* datanya memang luar biasa, 2,1 menjadi 33,8, itu *kan* ini luar biasa, berapa ribu persen seperti itu, ini yang kedua.

Kalau yang ketiga, samalah, tadi Pak Andre, Pak Harris, kaitannya dengan kasus Batam itu, *kan* sebetulnya karena itu Presiden sudah menunjuk Bapak, kami sebenarnya berharap kalau anulah cerita yang sebenarnya itu *kayak* apa, karena kan selalu ketika ada peristiwa, ceritanya pasti bertolak belakang, ini yang pertama. Kemudian ya saya berharap Bapak bisa memberikan solusi yang terbaik, karena memang Bapak terkenal punya rasa patriotisme yang sangat tinggi.

Terima kasih, Pak Menteri.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Terima kasih, Pak Ananta.

Masih ada dari *floor*? Cukup?

Saya menggarisbawahi *aja*, Pak Menteri, terutama tentang Pulau Rempang ya. Kejadian kemarin sudah terjadi, jadi tidak bisa kita memutar jarum jam untuk mengatakan jangan sampai terjadi. Jadi karena sudah terjadi, kami berharap ada proses rekonsiliasi yang tuntas dan komunikasi yang selama ini mungkin agak rumit, bisa diurai dengan Pak Menteri datang ke Pulau Rempang. Dan saya yakin dengan kemampuan komunikasi Pak Menteri, segala keruwetan bisa diatasi.

Koordinasi menjadi soal yang harus dituntaskan, Pak Menteri. Karena kalau koordinasinya kemarin itu tuntas mestinya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin banyak pemainnya juga dan mengurai *interest* lokal itu penting juga untuk dilakukan, Pak Menteri. Barangkali bukan hanya persoalan orang lain tidak ingin Indonesia maju atau orang lain tidak ingin Indonesia memiliki hilirisasi yang baik tentang pasir kuarsa dan sebagainya, tetapi barangkali ada konflik-konflik kepentingan lokal yang harus diurai oleh Pak Menteri, sehingga apa yang kemarin terjadi itu, itu bisa diselesaikan dengan baik. Asumsinya begini, Pak Menteri, asumsinya, kalau yang disampaikan Pak Andre tadi itu, yang difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah sudah menyediakan sekian-sekian itu terkomunikasikan dengan baik, rumah sudah disediakan, tanah sudah juga disediakan. Bahkan saya dengar juga uang pengganti sudah disediakan, uang sampai bangunan rumahnya bisa ditempati juga sudah disediakan. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas, *enggak* ada persoalan Pak Menteri, tapi faktanya kan kejadian itu ada.

Nah menjadi satu pertanyaan, *kenapa* sesuatu yang sudah dijanjikan sudah disediakan, tetapi masih ada sebagian masyarakat yang menolak dan penolakannya itu sangat keras? Apakah itu bagian masyarakat yang tidak terakomodir atau masyarakat yang ingin lebih lagi daripada yang disediakan oleh pemerintah? Atau ada masalah sosial budaya yang harus terpecahkan, barangkali karena ada yang mungkin saja tereliminasi karena investasi tersebut, atau karena ada faktor-faktor kultural yang lain yang harus segera diurai oleh Pak Menteri.

Tapi kami percaya dengan kemampuan Pak Menteri berkomunikasi, mungkin agak lucu-lucu sedikit, seperti biasanya Pak Presiden bisa tertawa, kalau Pak Presiden saja bisa tertawa, saya berharap rakyat di Pulau Rempang bisa tertawa dengan kehadiran Pak Menteri.

Itu Pak Menteri, saya betul-betul berharap Pak Menteri bisa menyelesaikan persoalan di Pulau Rempang secepatnya. Karena itu, kami juga tidak ingin memperpanjang rapat ini, Pak Menteri, kalau perlu bukan besok seperti Pak Andre sampaikan, kalau perlu sore ini Pak Menteri berangkat ke Pulau Rempang, beserta Pak Andre, langsung berangkat.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Luar biasa, setuju, setuju, Pimpinan.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Setuju ya? Kalau Pak Nusron diajak, *enggak* mau, pasti.

Silakan, Pak Menteri, kasih tanggapan.

F- PKS (RAFLY KANDE):

Pak Sarmuji, Ketua, izin, Ketua.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak Rafly, ada.

F- PKS (RAFLY KANDE):

Tenang, aminkan dulu, aminkan dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Ketua, teman-teman Anggota,

Pak Menteri yang kita hormati, yang kita muliakan, yang kita doakan sehat lahir batin ya,

Mohon maaf, Pak Menteri, saya pakai kaca mata, mungkin agak sedikit dehidrasi.

Pak Menteri yang terhormat,

Satu sisi memang kita melihat ada ikhtiar yang begitu hebat dari Pak Menteri, bagaimana iklim investasi itu berdampak efek kepada bangsa kita, bagaimana kita bisa mengelola, mengoptimalkan sumber daya manusia, juga mengoptimalkan sumber daya alam. Yang kita tahu bahwa negeri kita negeri yang terkenal dengan sangat kaya raya dengan sumber daya alamnya. Mungkin ada satu yang kita abaikan barangkali, Pak Menteri, karena kita rakyat Indonesia itu sudah terbiasa hidup di dalam suasana kebahagiaan. Bagaimana kita bisa membangun interaksi sosial, juga bisa membangun interaksi antara kita dengan alam itu sendiri. Oleh sebab itu, ikhtiar Pak Menteri akhir-akhir ini selama Pak Menteri duduk di kementerian, banyak masyarakat juga mengapresiasi bahwa capaian-capaian ini sangat luar biasa. Tapi yang kemarin, ini menjadi sebuah ujian bagi, Pak Menteri, ini terjadi gesekan sosial yang sangat luar biasa.

Menurut saya, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ada yang alpa, ada keabaian dari kita untuk merespons persoalan batin daripada masyarakat itu sendiri. Padahal kebahagiaan masyarakat kita itu sederhana sekali, yang hari ini mereka bisa hidup tenang, bisa hidup bahagia, bisa hidup sederhana, bisa ngopi, *kan* itu sederhananya, Pak Menteri. *Nah*, menurut saya kalau hal-hal seperti ini tidak bisa kita respons secara nilai-nilai kultural, ini akan menjadi benturan-benturan besar ke depan. Saya ingin wabil khusus dengan situasi di Aceh, contohnya, Pak Menteri. Pada tahun 70, investasi besar yang masuk ke Aceh yaitu melalui Arun LNG, *nah*, itu justru bukan membahagiakan masyarakat Aceh, malah menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan sosial, hingga memunculkan berbagai persoalan perselisihan yang ada di Aceh.

Nah, oleh sebab itu, bercermin dari situ, *wabil khusus* dengan Aceh, dengan sumber daya alam yang sangat luar biasa, saya ingin ada satu skema, saya ingin ada satu pemikiran, saya ada, saya berkeinginan ada semangat dasar bagaimana, bagaimana mengelola sumber

daya alam hingga alam itu benar-benar memberikan kemanfaatan untuk kita, kemudian alam itu juga bersahabat dengan kita, ini penting menurut saya, Pak Menteri. Karena di Aceh masih, masih sangat, masih sangat natural ini. Mungkin ini cara Allah untuk menyelamatkan Aceh, hingga nanti ada suatu sistem, ada suatu pemikiran yang sangat-sangat substansi, bagaimana alam memberikan kemanfaatan tetapi alam tidak murka kepada manusia itu sendiri. Saya yakin, Pak Menteri, kita berada di dua poros untuk menyangga Indonesia yang besar ini, Pak Menteri. Saya dari Aceh, Pak Menteri dari Papua. Aceh adalah awal, awal untuk membuat negeri ini ada, Indonesia ini ada, Papua yang menjaga keberlanjutan, tepuk tangan dulu *dong*, jangan sungkan-sungkan.

Jadi, jadi menurut saya, jadi hari ini, Pak Menteri, bahwa antara Aceh dengan Papua ini akan menjadi sumbu besarnya ini. Bagaimana bangsa ini kembali kita tata dengan hebat hingga masyarakatnya merasa bahagia. Ini sekarang persoalan kebahagiaan yang *enggak* ada, ruang kebahagiaan itu yang tersumbat, *nah*, di sini distorsinya. Makanya oleh sebab itu ke depan yang kita inginkan adalah sebuah pemikiran-pemikiran, bukan hanya sekedar atraksi tetapi ada substansi yang harus kita paparkan, yang harus kita pahami kepada masyarakat.

Harapan saya satu, yang terjadi di Rempang hari ini, mudah-mudahan Pak Menteri punya inisiatif yang sangat luar biasa bagaimana melakukan pendekatan kultural. Pendekatan ini yang sangat penting. Bila rasa ini yang kita jahit, saya yakin akan ada harmoni, kepentingan investasi bisa masuk, untuk keberlangsungan Indonesia. Rasa kultural yang ada di masyarakat Melayu, pada umumnya kita Melayu *nih*, ini juga akan hangat kembali. Mari kita berpikir secara bersama-sama bahwa persoalan gesekan sosial jangan terjadi, jangan meledak lagi.

Terima kasih, Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Waalaiikumsalam,

Masih ada satu lagi, Pak Amin.

F- PKS (AMIN AK, M.M.):

Iya, terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan Anggota Komisi VI yang saya hormati,
Pak Menteri, Pak Bahlil, yang selalu ceria tapi kali ini kelihatan *capek* kata Pak Andre *gitu* ya, kelihatan kusut, dan
Semua jajaran yang saya hormati,

Ini melengkapi ya, pertanyaan teman-teman terkait dengan kasus Rempang, Pak. Kita semua kan sepakat, Pak, bahwa tugas pemerintah sesuai dengan konstitusi adalah menyejahterakan rakyat, bukan menyejahterakan, *enggak* ada bahasanya menyejahterakan investor, *gitu*, *enggak* ada, tapi menyejahterakan rakyat ya, itu amanat konstitusi. Dan salah satu pintu masuk yang paling efektif, strategis adalah melalui investasi. Jadi benar kata Pak

Andre, kita sangat mendukung investasi itu, tapi tentu dengan investasi yang ada itu jangan sampai ada pihak-pihak yang dikorbankan, apalagi rakyat banyak yang dikorbankan. *Nah*, terkait dengan kasus Rempang itu Pak saya berharap memang tadi melengkapi yang disampaikan oleh kawan saya Pak Rafli, itu harus dilakukan pendekatan yang sebaik-baiknya. Kalau terjadi kasus seperti itu yang kita saksikan itu, itu berarti ada sesuatu yang salah. *Enggak* tahu salahnya apa, mungkin prosesnya, apa mengambil istilah Pak Jokowi, *grasa-grusu* ya, atau terlalu mematok waktu harus selesai, tanggal sekian *nih* harus selesai, padahal *start*-nya mungkin telat, sudah terlambat. Kalau memang dibutuhkan waktu lama, ya *enggak* apa-apa tempuh waktu yang lama, yang penting *smooth* dan rakyat tidak menjadi korban. Jangan dipatok tanggal sekian *nih* harus selesai ya, tapi rakyat terkorbankan. Jadi dilakukanlah pendekatan sebaik-baiknya.

Saya yakin rakyat ini kalau komunikasinya bagus ya, prosesnya berjalan dengan baik ya, dan mereka merasa tidak dirugikan, masalahnya bukan sekedar jaminan rumah, luasnya sekian, tanah sekian, tapi yang paling penting tentu saja bagi mereka adalah soal kehidupan ya, ya. Penghidupan, kehidupan, berkelanjutannya itu bagaimana mereka bisa hidup, eksis di lingkungan yang baru, itu yang pertama, Pak Menteri.

Kemudian yang kedua, ini, Pak, saya baca di media-media yang sempat saya ikuti, soal hasil KTT ASEAN, Pak. Di situ ada proyek konektivitas dan rantai pasokan ASEAN. Pertanyaan saya, Pak, pertama, apakah ini akan mendorong konektivitas laut untuk menekan biaya logistik yang sangat mahal? Yang ini peringkat kita ini sempat viral *kan*, Pak Luhut sendiri menyatakan ya ini menjadi perhatian kita bersama dan rangking kita juga *nurun* untuk urusan ini *kan* di dunia ya, itu pertama. Yang kedua, apakah nanti kalau itu iya, pengerjaan proyek-proyeknya konektivitas ini bisa melibatkan atau akan melibatkan BUMN atau tidak? Dan kalau *enggak* salah juga yang saya sempat baca *link*-nya ini, Jepang sudah menyanggupi untuk ikut dalam proyek konektivitas laut ini, *nah*, bagaimana tindak lanjutnya?

Itu Pak Menteri, Pak Pimpinan, pertanyaan dari saya singkat saja.
Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Makasih.

Cukup? Silakan Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Baik, terima kasih.

Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota Dewan yang saya hormati,

Banyak pertanyaan tapi lebih pada Rempang dan beberapa hal lain termasuk di dalamnya OSS dan khusus untuk yang mulia Pak Andre, menyangkut dengan PT Abaco.

Bapak-Ibu semua,

Saya ceritakan menyangkut tentang apa namanya Rempang, karena Bapak Ibu semua meminta saya untuk tidak boleh ada dusta di antara kita, maka saya akan menceritakan apa adanya yang saya ketahui tentang persoalan Rempang.

Bapak-Ibu semua,

Kita tahu bahwa semua kita bersepakat dalam konteks pembangunan investasi mengarah kepada satu instrumen yang namanya hilirisasi, bagian daripada industri. *Nah*, ini ceritanya begini sebenarnya, kita ini kan sudah sukses untuk membangun hilirisasi di nikel. Terlepas dengan kesuksesan itu belum sempurna, kita sepakat itu juga, jadi jangan kita bilang bahwa semua 100% *udah* sempurna. Kesempurnaan itu hanya punya Tuhan *aja*. Tetapi kita selalu memperbaiki untuk mendekati diri pada kesempurnaan itu. *Nah*, karena nikel sudah bagus sekarang kita mulai masuk kepada sektor hilirisasi komoditas yang lain, contoh bauksit, kita sudah bikin alumina. *Nah*, satu lagi yang kita buat ini adalah investasi yang namanya pabrik kaca untuk solar-solar, solar panel, yang hari ini lagi tren dunia untuk memakai energi baru terbarukan. Bahan baku daripada kaca dan solar panel ini diantaranya adalah pasir kuarsa dan pasir silika. Di Indonesia, kita ini masih ekspor semua, makanya industrinya itu ada di beberapa negara di Asia, termasuk Korea, termasuk China, termasuk Jepang, kita hari ini ekspor semua ke sana. *Nah*, belum ada pabrik yang besar untuk membangun pabrik kaca dan pabrik solar panel di Indonesia. Sekalipun sudah ada beberapa pabrik kaca di Indonesia seperti Asamasi dari Jepang, kemudian ini sekarang lagi mau di, mau produksi di Batang, yang di, bukan Batam ya, Batang, di KCC tahun 2024 sudah produksi, tetapi itu pada kapasitas yang tidak terlalu besar. Yang kita mau bangun ini adalah kapasitas 200, 200% dari yang sudah ada terpasang di Indonesia dan yang akan dibangun, ini adalah pabrik kedua terbesar di dunia setelah China. Jadi di luar China ini pabrik perta, pabrik yang besar dan produknya itu adalah pabrik kaca untuk berbagai macam jenis dan solar panel, ini biar saya *ceritain*, inilah untuk hilirisasi.

Yang kedua sekarang adalah pertanyaannya, investasinya ini tujuannya ke negara mana saja? Karena yang punya pasir kuarsa itu bukan hanya punya Indonesia, negara tetangga juga punya, ini. Dan tetangga itu, mohon maaf, Pimpinan, ini karena beberapa hari *enggak* bisa, ya namanya pembantu, kita harus kerja, kalau presiden kita kerjanya keras, kita harus lebih keras, itu jadi itu ya.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Ini bisa dipertimbangkan oleh Pak Prabowo jadi menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Kalau itu tidak perlu ada pertimbangan dari Pak Andre, kita yang mempertimbangkan Pak Andre, kalau itu.

Jadi saya lanjut, Pimpinan, karena pasir kuarsa dan silika ini tidak hanya dimiliki oleh Indonesia, ini juga dimiliki oleh negara tetangga sebelah. Maka pertama yang kita lakukan itu adalah kompetisi pertarungan untuk mendapatkan investor ini dan itu tidak gampang. Kemudian penentuan lokasi, ini saya masuk ke bab masalah ini, masalah, apa, lokasi yang ditunjuk adalah Provinsi Kepri, Kota Batam, kampungnya itu, pulaunya itu, namanya Rempang. Rempang ini masuk dalam wilayah pengelolaan kawasan BP Batam, yang menurut aturan BP Batam, saya pikir Bapak-bapak lebih paham karena saya ini baru masuk di pemerintah, Bapak-

bapak lebih paham karena sudah sering raker dengan BP Batam. Areal yang dikuasai itu adalah merupakan kewenangan yang diberikan kepada, diberikan apa, kewenangan negara yang diberikan kepada BP Batam, untuk melakukan pengelolaannya.

Nah, terkait dengan Rempang, saya *udah* pernah di sana, Pak Andre. Pak Subardi, saya juga sudah pernah dari sana, Pak. Ketika kami mulai menandatangani MoU, saya jujur itu mengatakan, yang tanda tangan MoU itu adalah kami, Kementerian Investasi, dengan investornya. *Kenapa* itu saya lakukan? Karena pertama saya melihat adalah ada penciptaan nilai tambah yang signifikan dan kita menjadi negara yang akan mengekspor produknya dan kita dapat pajak di sana, dan ada neraca perdagangan di sana, dan ada penciptaan lapangan pekerjaan di sana, dan ada kontraktor di sana, maupun *supplier* yang notabenehnya adalah anak-anak republik ini. Dibandingkan dengan kita menjual, menggali pasir silika, menggali pasir kuarsa, dan kita jual. Saya pikir belum ada teori ekonomi yang saya dapatkan, mohon maaf, nanti Pak Turino juga, Pak Harris juga jelaskan kepada saya, kalau saya salah omongan saya ini, yang mengatakan bahwa menjual bahan baku itu lebih untung daripada membangun nilai tambahnya di dalam negeri.

Nah, pulau ini, Bapak-Ibu semua, pada tahun 2002 apa 2003 itu sudah dikerjasamakan dari BP Batam dengan satu perusahaan yang namanya MEP? MEG. Ini barang ini kalau mau ditanya jujur, saya juga baru tahu, baru tahu ketika diberikan tanggung jawab untuk mengurus ini. Kalau saya bilang semua tahu, berarti saya ini Tuhan yang maha tahu, dan itu juga *enggak* bagus *gitu*.

Nah, begitu saya tahu lalu kemudian saya turun *ngecek*, apa macam kondisi ini barang. Begitu saya turun, ternyata di sana berdasarkan data dari kotamadya, ada camatnya di situ, saya datang, saya datang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Walikota, BP Batam, semua, Forkopimda sebagian Forkopimda, dan peserta rapat umum. Pada awal Agustus, belum kacau begini, Andre, itu saya datang di sana dan menemui warga, saya bicara sama warga. Jadi di sana kurang lebih sekitar 3 ribu KK dan 16 ka, ada 16 kampung tua, dan saya datang itu bukan katanya, bukan datang di Kota Batamnya, *enggak*, saya datang di kampung itu. Saya duduk di kantor kecamatannya dan saya menemui warga yang datang untuk bicara, *gitu* ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Harus jujur saya katakan bahwa sebagian yang rakyat di sana menurut data dari Pemda Kota Batam yang disampaikan langsung waktu itu oleh camatnya di depan walikota, bahwa benar sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu ada alas haknya sebagian, yang memang berarti secara turun-temurun sudah di sana. Tapi tidak bisa kita naifkan juga bahwa ada yang baru, ada yang baru itu di mana datang, sudah di atas 2004, makanya Pak Kadirnya waktu itu jadi walikota pernah membuat surat keputusan edaran kepada bawahannya agar jangan memberikan izin atau alasan yang berbentuk apa pun kepada rakyat yang akan tinggal di sana, itu ada suratnya tahun 2004, saya punya data itu. Bisa kita cek karena beliau yang mulia juga adalah Anggota DPR Komisi VI, Pak Nyat Kadir. Perlu atau *enggak*, ini kita bicara *fair-fair* aja, saya *kan* *enggak* mau dusta.

Berikut saya juga waktu ketemu rakyat, saya bilang, saya ini orang kampung, saya juga punya hatilah, *enggak* mungkin kita mau gusur orang kalau hak-hak orang kita ini, untuk apa *gitu*? Tetapi kita harus tahu juga bahwa ini ada kepentingan negara, juga ada kepentingan rakyat. *Nah*, dalam konteks ini kemudian Pemerintah waktu kita merumuskan antara Pemda Kota Batam yang notabenehnya *ex officio* Kepala BP Batam, Gubernur, sebagian Forkopimda. Apa formulasinya? Karena sebagian yang tinggal di situ *enggak* punya alas hak, berarti kan tanah itu dikuasai oleh negara lewat BP Batam. Tapi saya tidak mau bilang, saya tidak mau gusur begitu *aja*, *enggak* boleh, mereka ini saudara-saudara kita. Jadi ini sebenarnya bukan,

kalau penggusuran itu *kan* barang yang dia sudah miliki, kemudian kita mau ambil *gitu kan*, tapi kalau bukan, itu *kan* berarti kita relokasi mereka. Ya ini *kan* menertibkan aja merelokasi tapi dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang baik-baik ini ceritanya.

Maka dibuatlah solusi yang tadi Pak Andre sampaikan, kita berikan per KK itu 500 meter persegi, dengan langsung diberikan alas hak, supaya tidak lagi tinggal, tidak ada alas haknya. Apa itu alas haknya? Sertifikat, yang langsung dikeluarkan oleh BP Batam, artinya mereka sudah mempunyai hak itu. Kemudian kita berikan pembiayaan untuk bangun rumah tipe 45, Bapak-Ibu semua. Dengan harga kompensasinya dihitung kurang lebih 120 juta. Kemudian kita relokasi mereka ini, tadinya di tempatnya ada gunung, Pak Sarmuji. Saya sendiri naik ke lokasi itu, memang agak berat naiknya, tanjakan. Maka setelah itu saya pulang, saya panggil BP Batamnya, "Coba dicek, kalian masuk akal *enggak*, orang tinggal di nelayan, kerjanya nelayan kita tinggalkan mereka di atas". Akhirnya karena kebaikan juga BP Batam ini, saya pikir Pak Kepala BP Batam itu *udah* sangat pro aktif dengan deputy-deputinya. Maka mencarilah alternatif, di wilayah yang lain, tapi di pinggir pantai yang jaraknya kurang lebih, mohon maaf, kalau saya tidak salah, kurang lebih itu tidak lebih dari 10 kilo, itu di pinggir pantai juga. Pantainya juga di pantai yang sama, yang digambarkan dalam peta kepada saya, mudah-mudahan saya tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah.

Nah, kemudian di dalam situ akan dibangun infrastrukturnya, akan dibangun jalannya, akan dibangun GT-nya untuk saudara-saudara kita yang nelayan, bahkan kita bilang, sebagian dari mereka yang nelayan itu kita pikirkan untuk membuat program tentang nelayannya, waktu itu. Setelah itu apakah sudah selesai? *Enggak*, uang tunggunya tadi Pak Andre sampaikan, ini kan masa pembangunannya kan enam bulan sampai tujuh bulan. Rumahnya kita *kontrak*, kemudian ada biaya tunggu, biaya tunggu ini memakai data BPS. Memang ada aspirasi lain yang meminta agar jangan 1.030.000 lebih itu, Pak Andre, ada per orang, ada dimintanya agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi sudah kondisinya *kayak* begini. *Nah*, apa yang kita lakukan Bapak-Ibu semua? Sebenarnya hal ini *gini* ya, kalau saya, saya punya tim sekarang lagi di lapangan. Ada tiga poin yang saya mau ingin sampaikan, dugaan saya, tapi jangan kita *suudzon* dulu, dugaan saya.

Yang pertama karena memang sosialisasinya belum berjalan baik, harus diakui. Dan kemarin Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk turun langsung yaitu memang tanggung jawab sebagai menteri yang dari, dari anak kampung. Saya akan dengan, waktu saya turun itu pun, saya sempat ditemui oleh rakyat, ya ada demo-demoan kecil-kecilanlah, tapi saya temui mereka, tapi baik *kok*, *Insyallah* kalau kita *ngomong* baik-baik *Insyallah* mereka juga punya hati *kok*, mereka juga *ngomong* baik. *Nah*, itu satu, komunikasi yang kurang bagus.

Yang kedua, Bapak-Ibu semua, ini wilayah ini pernah diberikan izin enam perusahaan, aku jujur *aja* di dalam ini. Di mana izin itu setelah ditengarai, diusut-usut, bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur, maka kemudian dicabut, Pak Ketua. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi dibalik itu semua.

Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Harris tadi, Turino tadi, tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Saya mau tanya sama kalian *deh*, Bapak-Ibu semua yang terhormat ini. Dulu waktu kita zamannya BP Batam ini dibuat untuk menjadi kawasan ini untuk menjadikan apa, mengimbangi Singapur, saya mau tanya, apa *sih* yang terjadi sekarang? Harusnya kita berpikir ada apa dibalik ini semua.

Setiap kita membangun besar di sana, ada *aja*, ada *aja*. Sebagian mantan aktivis, sebagai juniornya Pak Nusron, kita diajari biasanya, kalau mau minum air putih yang merah, kita tidak tanya *kenapa* dia merah. Tapi Pak Nusron punya ajaran adalah ada apa ini, racun atau pemanis? Saya mencoba untuk memakai analisa itu dalam konteks ini. Jadi menurut saya, dan ini sudah viral *loh* ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu *tuh*, itu di *viral* di Tiktok-Tiktok, itu agak merisaukan kita juga *ngapain* dia bule *ngurus* negara kita. Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik. Jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif.

Jadi menurut saya, ini harus kita selesaikan dengan baik-baik, kalau yang punya hak, kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara *enggak* boleh kalah juga dari *kayak* begini-begini, *endak* bisa *dong*. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar *aja* semua. *Enggak* ada unsur investasi, semuanya mulus. Itu terkecuali mau bangun masjid *aja* kadang-kadang ada sengketa tanah *kok, gimana?* Apalagi investasi, ini kita *fair-fair* aja. Tapi Bapak-Ibu semua, yakinlah bahwa *Insyallah*, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk turut menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu di beberapa menteri, senior-senior saya, akan membantu untuk menyelesaikan hal ini.

Saya yakinkan bahwa memang juga ada tadi disampaikan oleh Pak Rafly tadi, menyangkut dengan urusan di lapangan itu, memang benar, Pak, kebahagiaan ini, kalau kita mau cari kebahagiaan hakiki itu ya saya tidak tahu definisi kebahagiaan ini, kadang-kadang kita punya duit juga belum tentu bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan pada jabatan, Bapak-bapak ini kan semua belum tentu bahagia tiap hari ini, *kayak* saya ini. Saya Menteri, Bapak-bapak Anggota DPR, *emang* tiap hari kita bahagia? *Enggak* juga. Jadi kalau pakai standar kebahagiaan seperti apa, bingung saya. Jadi itu menyangkut dengan Batam.

Dan *Insyallah* kalau saya sudah turun ke lokasi, Pak Sarmuji, mohon maaf tidak bisa saya turun sore ini, karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden untuk meninjau pabrik LG baterai sel yang sudah produksi di Karawang, Jawa Barat, Pak Andre. Ini sudah *trial error* ya? Sudah *trial error*, iya sudah *production* sudah *kan?* Sudah *production*, yang *Insyallah* akan sudah bisa dijual itu di awal tahun depan. Oh nanti setelah Pak Presiden datang, baru saya akan pimpin langsung.

Kemarin saya ke Lotte, mana tadi dari Pak ini Pak, Banten, Pak, oh iya memang, iya Pak Ananta. Ya, nasib menteri ini begini, setelah tanya, setelah tanya, yang mulia, yang mulia pergi, memang itulah tata tertib yang mulia-yang mulia. Saya *enggak* bisa begitu soalnya. Saya kencing *aja* tiga menit dia bilang "mana menterinya ini, kurang ajar ini menterinya, kenapa yang mulia lagi ngomong menterinya keluar?" Jadi saya juga bingung, kira-kira polanya ini juga harus berubah, kira-kira Pimpinan.

F- PG (NUSRON WAHID):

Bagaimana, *pingin* pindah posisi?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Itu bisa dirundingkan, setelah partai Bapak bisa kita konsolidasikan dengan baik.

Jadi saya lanjut,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Menteri, yang *enggak* ada, *enggak* usah dijawab.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya menyangkut dengan contoh katakanlah, saya kasih contoh, ya Lotte Chemical, investasinya 3,9 miliar USD hampir 60 triliun, empat tahun mangkrak gara-gara tanah, empat tahun. Saya masuk itu sudah empat tahun mangkrak, investasi Korea. Dan begitu saya masuk saya selesaikan dengan caraku. Tidak ada teorinya, sekali penerus, ada yang masuk pesantren. Tapi sekarang apa yang terjadi? Konstruksinya sudah 72%, kemarin Bapak Presiden tinjau dan itu substitusi impor.

F- PG (NUSRON WAHID):

Pak, sebelum ke situ, Pak, ingin izin memperdalam yang Rempang, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Sebentar dulu.

F- PG (NUSRON WAHID):

Iya siap.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Inilah susahnya jadi menteri juga begini, kita mau jawab sedikit, maksud saya masih mau balik ke Rempang ini, ini cuma belok sedikit, saya kembali ke laptop, gitu kan. Saya mau kasih contoh, ini Pak Nusron, menyangkut tanah setiap investasi gede, itu pasti ada dinamikanya, pasti ada dinamikanya. *Nah*, di Lotte itu, waktu saya selesaikan, itu juga membutuhkan energi yang sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi sekarang? Hampir selesai, 2025 sudah produksi. Berapa neraca perdagangan kita yang kita perbaiki dari situ? Lapangan pekerjaan sekarang 13 ribu lebih, hanya 5% dari Korea, selebihnya saudara-saudara kita dari dalam negeri.

Pak Andre, saya sebagai Menteri Investasi tidak boleh bicara tentang hanya satu negara, harus menyeluruh, karena saya selalu berpikir bahwa negara dari langit pun yang masuk ke Republik Indonesia sudah memenuhi aturan dan sesuai aturan, saya akan buka karpet merah yang sama dengan yang lain gitu.

Iya, Lotte 60 triliun. *Nah*, itu contohnya. *Nah*, Rempang ini juga begitu, tidak ada barang besar yang mulus, *enggak* ada, *enggak* ada, jadi pasti ada dinamikanya. Saya pikir itu. Silakan kalau mau memperdalam menyangkut Rempang dan saya *Insya Allah* paling lambat akhir minggu ini, saya akan masuk ke Batam, untuk kemudian saya melaporkan kepada Bapak Presiden. Dan yang kedua atas izin dan perintah yang mulia-yang mulia ini, maka saya akan memberikan laporan.

Menyangkut Ibu Evita, Bu,

F- PG (NUSRON WAHID):

Pak, *anu* dulu, Pak, soal Rempang dulu, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Oh iya siap, siap.

F- PG (NUSRON WAHID):

Pak Ketua, izin ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan.

F- PG (NUSRON WAHID):

Kalau menurut keterangannya Pak Menteri ATR, yang HPL-nya BP *anu*, Batam itu *kan* hanya 600 hektar, luasnya ini *kan* 17 ribu hektar. *Nah*, yang bakal mau dibangun untuk kawasan industri itu semua pulau itu atau hanya yang ada 600 hektar itu *aja*, Pak?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Jadi *gini*, luas pulau wilayah itu kurang lebih sekitar

F- PG (NUSRON WAHID):

17 ribu.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

No, no, no, total dengan pantainya berapa? Kalau tidak, *sorry*, totalnya itu lebih dari 30 ribu, pantai, tetapi di situ ada hutan lindung yang *enggak* bisa *diapa-apain*. Yang kita bicara ini adalah 600 hektar itu yang sudah HPL, ada penurunan status untuk menjadi HPL ada sekitar 7 ribu berapa *gitu*, 7.300 berapa? 7.300 sampai 7.600,

F- PG (NUSRON WAHID):

Kepada Otorita Batam?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya, ini yang HPL-nya lagi kita *ngurus*, prinsip persetujuan untuk turunnya sudah, sekarang lagi diukur, untuk kemudian menjadi HPL. Jadi totalnya itu kurang lebih sekitar ada 8 ribu hektar.

F- PG (NUSRON WAHID):

Itu yang ada penduduk itu yang mau diturunkan statusnya itu, atau yang 600? Yang ramai itu yang diributkan oleh penduduk itu yang,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Di 600, di 600.

F- PG (NUSRON WAHID):

Yang di 600?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

600 karena di 600 itu di pinggir pantai.

F- PG (NUSRON WAHID):

Oke berarti yang 600 *udah* ada HPL-nya, yang diributkan oleh penduduk itu?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Sebagian sudah ada tapi saya *enggak* bisa menjelaskan detail, saya harus bawa petanya.

F- PG (NUSRON WAHID):

Oke, oke, oke.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya jangan sampai *ngomong* di ruangan ini keliru, saya nanti dianggap bohong, saya tidak mau dianggap menteri bohong begitu, Pak. Tapi mungkin begini Pak Nusron, setelah saya ke lokasi, setelah saya ke lokasi saya *ngecek* detailnya baru kalau boleh kita duduk rapat setengah resmi sambil makan untuk menjelaskan khusus menyangkut dengan Rempang agar kita mempunyai data yang komprehensif.

F- PG (NUSRON WAHID):

Saya khawatir begini, Pak, ya, ini kan masalah metode penanganan. Kalau yang ditangani itu adalah penduduk yang sudah menempati 600 hektar yang sudah ada HPL-nya atas nama Otorita Batam, itu 100% memang salah penduduknya, 100%. Kita mau apa-apain, kita *enggak* bisa bela, Pak. Mau atas nama rakyat, atas nama orang susah, itu kita *enggak* bisa apa-apain. Tapi yang di luar itu yang masih dalam bentuk HGU negara, yang masih dikuasai negara, belum ada HGU, belum ada HPL, dan dia penduduk asli setempat di sana, nenek moyangnya tinggal di situ, bukan pendatang, bukan orang Bugis, bukan orang Jawa, bukan orang Madura, ya *kan*, mungkin itu yang menjadi isu krusial. Saya *concern*-nya di situ, Pak. Kalau dia orang Jawa, orang Bugis, orang Madura, pasti dia pendatang *dong*. Tidak boleh *dong* menduduki pendatang atas nama, atas nama nenek moyang atau hak adat atau apa

macam-macam. Kalau dia orang asli di sana, mungkin itu masih ada atas nama hak adat dan sebagainya. Ini poinnya saya di situ, Pak Ketua, *pengen tahu petanya kayak apa, sebelum kami bersikap.*

Terima kasih Pak *anu*, Pak Menteri.

F- PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Pimpinan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Makasih, sebelum

F- PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Tadi saya ke toilet, terus ini ya, jadi tadi saya dengar disebut saya di toilet, terus saya balik.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Iya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Baik, saya jawab, Pak Nusron baru saya ke Bapak lagi, mohon maaf yang mulia.

Jadi saya setuju sama Pak Nusron, jadi Pak Nusron, persetujuan saya itu adalah kita cek datanya dulu, kalau itu memang, mohon maaf, hak kesulungannya itu sudah di sana dan dapat kita lihat sejarahnya, petanya, maka kita saya pikir, siapa pun pasti punya hati yang baiklah. Kita ini kan semua pernah di kampung dan kita dibesarkan di kampung. Bagaimana kalau barang kita juga dibuat yang tidak sepatasnya dilakukan. Jadi pasti ada perlakuan-perlakuan yang lebih, lebih baik, ya lebih kekeluargaan, lebih apa ya *soft gitu*.

Nah, menyangkut dengan melepas teman-teman di yang lagi ini, kalau, jadi *gini*. Demo kemarin itu juga saya lihat, mungkin ada kekeliruan dalam penanganan, tapi kita juga lihat polisi kasihan itu, Pak Nusron. Kita sebagai mantan demonstran, melihat saudara-saudara kita menghajar polisi yang sudah mereka begini tapi batu masih begini *tuh*, itu demo apa, saya bingung juga itu. Jadi kita *enggak* bisa salahkan semua polisi, *enggak* bisa juga. Bahwa ada kekeliruan, oknum mungkin iya, tetapi saya lihat divideonya, itu juga sedih saya.

F- PG (NUSRON WAHID):

Sudah keluar dari kode etik demonstran.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya kita kan tukang demo juga, Pak Nusron harusnya *ajarin* tukang demo dulu.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Harus ada perubahan ini, Pak Menteri, semua ini, Pak Menteri, harus ada perubahan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Iya, iya perubahan itu tergantung, kalau cuma perubahan seminar ya susah juga, *enggak* bisa,

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Yang penting Indonesia maju.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Investasi ini *enggak* bisa seminar-seminar, Ketua. Butuh eksekusi, kalau pidato tiap hari, susah, kita *enggak* bisa jalan, *enggak* ada realisasi investasi *gitu*.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Sepakat, Pak Menteri, *Insya Allah*

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Makanya sepakat Indonesia maju, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya secara *real aja* sebagai Menteri Investasi, antara konsep dan eksekusi dalam menangani investasi di Indonesia, harus eksekusi lebih banyak daripada pidato lebih banyak, dalam konteks investasi.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Lanjut, Pak Menteri.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Gitu bos, setuju, Pak Menteri, itu namanya perubahan itu ya.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Jangan ke *distruct*, fokus *aja*, fokus.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Tapi perubahan untuk kebaikan, bagus, jangan perubahan untuk tambah kacau barang ini. Saya ke Banten ya,

F- PG (NUSRON WAHID):

Tapi bukan berubah koalisi itu maksudnya, perubahan koalisi maksudnya *gitu kan*, kalau,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya langsung ke Banten, Pak, saya, Lebak dan Pandeglang. Saya kebetulan sering ke Lebak. Saya *Insyah Allah* ada membuat satu tempat di Lebak untuk pendidikan di sana. Saya dapat memahami ini, Pak, begitu tolnya masuk, Pak, sekarang kan tolnya lagi lingkaran masuk, kita ada bikin satu kawasan industri Lebak dengan Pak Jaya Baya, apa namanya? Di Cileles. Jadi memang saya tahu betul, memang lebih banyak di Cilegon barang ini, sama di beberapa di Tangsel, memang ini agak berkurang. Betul itu, Bapak. Dan demi dapil Bapak, maka saya tugaskan Deputi Promosi saya untuk khusus dan aspirasi Bapak, kami *Insyah Allah* akan tindaklanjuti dan mohon bantuan Bapak, Tangerang.

F- PDIP (ST. ANANTA WAHANA, S.H.):

Jadi harus berpikir bagaimana Banten ini sejahtera.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Cocok jadi gubernur kelihatannya ini. Pak, *makasih*, Pak, *makasih*, *makasih* banyak, Pak, *makasih*. Saya pikir itu masukan, *gimana*, oh Pak Andre menyangkut dengan Abaco. Waduh Pak Andre ini terlalu banyak, padahal Pak Andre kita kan sudah *komit* kemarin jangan banyak tanya, *gimana* Pak Andre ini.

Menyangkut dengan PT Abaco Internasional, saya yakin ini Pak Andre ini mau naikkan elektabilitas dengan pertanyaan ini. Yang pertama, Pak Andre, perusahaan yang ada di Air Bangis-Sumbar, ini Sesmen saya ini orang Sumbar, Deputi saya ini orang Sumbar juga, jadi menyangkut dengan PSN, belum masuk dalam PSN, belum masuk. Dan

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Jadi sebentar izin, izin, Pimpinan, izin, Pak Menteri.
Berarti,

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Detiknya sudah dikondisikan belum? Tanya begini Detiknya sudah dikondisikan?

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Itu gampang itu. Sekarang yang penting itu berarti proyek Air Bangis itu belum masuk PSN?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Dalam proses.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Dalam proses

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Dalam proses.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Dalam proses, tapi PSN-nya belum turun.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Belum turun?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Belum turun.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Kira-kira berapa lama lagi kira-kira, perkiraan Pak Menteri?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya *enggak* bisa meramalkan, itu karena kewenangannya tidak pada saya, kewenangannya pada Menko.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Menkomarvest?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Perekonomian.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oh Menko Perekonomian?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Jadi kalau Bapak kan sudah koalisi sama Golkar *kan*? Jadi Bapak boleh cek langsung, diantar Pimpinan, *gitu*.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya, iya, iya, iya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Ya, Pak Andre ya?

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Oke, terima kasih.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Lalu Pak Andre, yang lainnya

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Bonafidoze gimana bonafidenya?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya kebetulan kewenangan, kewenangan di Kementerian Investasi secara undang-undang tidak diberikan kewenangan untuk mengecek seberapa *bonafide* ini.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Eenggak, biasanya kan BKPM tuh punya intelijen mengecek itu.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Saya tidak bisa menjawab sekarang, karena butuh analisa.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Harus komitmen, Pak Menteri, ya harus komitmen.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Harus komitmen, karena saya tahu Pak Gubernurnya juga orang baik, dan Pak Andre juga orang baik.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Iya karena saya

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Jadi saya mengerti betul pertanyaan Pak Andre ini.

F- P. GERINDRA (ANDRE ROSIADE):

Saya waktu itu sudah menanyakan ke Deputy Bapak, sudah berapa bulan yang lalu. Saya menjaga iklim investasi, sengaja saya tidak pernah berkomentar di media, Pak Menteri. Saya berkomentar di ruang rapat ini dalam rangka menanyakan, karena warga saya butuh tahu, ini pertama, benar *enggak* investasinya sudah PSN? Karena dongengnya di kampung saya, itu *udah* dibilang PSN, itu satu.

Yang kedua, apa betul Abaco, ini karena tanah yang dimintanya 30 ribu hektar ya, Pak Menteri, lebih *gede loh* daripada tanah yang ribut di Pulau Rempang itu ya. Bahkan Pak Menteri baru lihat yang hampir 50 triliun-60 triliun di Lotte itu hanya 110 hektar, ini 30 ribu hektar, Pak Menteri. Itu pertanyaan kami, Pak Menteri.

Terima kasih.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pak Andre, saya ulangi ya, jawaban saya

F- PG (NUSRON WAHID):

Tergantung.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Karena saya tahu ini Pak Andre pasti rekam.

Yang pertama adalah PSN-nya belum keluar tapi proses PSN-nya sedang berjalan. Pertanyaannya kapan keluar? Pak Andre tolong tanyakan kepada Menko, ketua umumnya Pak Nusron.

F- PG (NUSRON WAHID):

Saya *udah* tahu jawabannya, jawabannya tergantung seberapa banyak Pak Andre berbagi suara sama Golkar di sana.

F- PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Tergantung Pak ya, itu digantung.

F- PG (NUSRON WAHID):

Semakin banyak berbagi, makin cepat itu kita.

F-PKB (Ir. H. M. NASIM KHAN):

Pak Andre sabar ya, setahun itu *udah* biasanya *kok*, ini berapa bulan.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Itu yang pertama.

Yang kedua, PT Aba, menyangkut lahan 30 ribu hektar, bukan domain Kementerian Investasi juga, karena dia kan pasti punya perencanaan ya, tetapi tergantung dari *size*-nya, dia mau bangun *size* berapa. Tapi kalau 30 ribu hektar untuk *bikin* suatu kawasan untuk *bikin refinery*, menurut saya mungkin yang membuat FS-nya itu yang harus kita koreksi itu, itu ya begitu, Pak Andre.

Yang lain-lainnya, mohon maaf saya akan,

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Ketua, mau tanya sebentar, Pak Ketua, sama Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Waduh, Pak, Pak sebentar Pak, saya jawab Pak Prof. Darmadi.

Prof, menyangkut NIB, memang Prof, jujur *aja*, NIB yang ada ini kan yang baru, tapi perusahaan yang sudah lama punya izin duluan itu, itu berlaku, bukan *enggak* berlaku. Tapi kalau pertanyaan Prof bahwa masih banyak UMKM yang belum dapat NIB, benar. Karena dalam data kami, tidak lebih dari 50% UMKM kita yang sudah punya izin, yang lainnya itu belum, Prof. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 30an sampai 30 juta lebihlah, Prof.

Nah, karena itu Prof, saya sudah perintahkan kepada deputi-deputi saya, untuk khusus di DKI, kalau Prof mau, kita *bikin* sosialisasi sebanyak-banyaknya Prof, supaya kita bagaimana memberikan pencerahan dan masukan kepada UMKM-UMKM di bawah binaan Prof. Karena saya melihat Pak Darmadi ini sangat *concern* betul terhadap rakyat kecil, karena sesuai dengan partainya kali, wong cilik, jadi saya sangat menyambut baik, *gitu*. *Cuman wong cilik* tapi *high profit* kan bisa bahaya juga. Saya pikir itu, Prof.

Menyangkut *icor*, Prof, jujur Prof, memang *icor* kita ini tinggi. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, Thailand, *icor*-nya itu 4,3, 4,5 karena itu memang kita itu *cost* ekonominya tinggi. *Cost* ekonomi ini bukan berarti karena logistik kita mahal, karena mental yang mohon maaf, sebagian oknum, yang memang harus kita sadar bersama-sama. Tidak etis Prof kalau saya ngomong apa saya maksudkan itu. Tapi Prof, tanpa bertanya pun sudah mengerti maksud saya, Prof, dan saya pikir setengah kamar *ajalah*, Prof, kita *ngomongkan* ini.

Satgas investasi jalan, Prof, karena kita *gini* Prof, salah satu ilmunya ini seperti angin, dapat dirasakan *enggak* bisa dipegang. Ini kan *kayak deal-deal* politik juga Prof, *enggak* ada bukti. Bisa *dong*, contoh begini, Prof, contoh menyangkut OSS, OSS ini bukan *enggak* jalan, jalan, Prof, dengan baik. Tapi kecepataannya, *enggak* cepat, karena apa? Izin untuk RKPPR dengan PPG itu belum *connect* langsung dengan OSS. Andaikan pun dia *connect* masih setengah proses, itu di kementerian teknis, ini saya jujur untuk Prof. Bagian-bagian itulah yang menyebabkan, mungkin ada hal-hal yang terjadi penyebab sehingga *icor* ini bisa naik, mungkin. Saya *enggak* bisa menduga-duga 100%. Tapi kita jangan *suudzon*, tapi ini PR kamilah Prof, untuk bisa kita turunkan bersama-sama.

Saya pikir itu, Pak Ketua, sudah lewat jam 12.
Terima kasih.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Pak Ketua, sedikit *aja*.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tadi *udah* kita tanya dua kali, cukup, Pak Khilmi.

F- P. GERINDRA (KHILMI):

Pak Menteri, ini kan terjadi penciptaan lapangan kerja 13 ribu, seperti Freeport itu *kan* kemarin 14 ribu sampai 20 ribu, tapi waktu operasional nanti itu *kan* pegawainya kan cuma 700, *kayak* di Freeport, Pak, ya, itu kan cuma 750 orang. Apakah nanti di Lotte, itu juga *kayak* begitu? Itu *kan* nanti terjadi apa, pengurangan lapangan kerja yang sangat besar, padahal Bapak *kan* akan menciptakan lapangan 13 ribu orang. *Kayak* di Freeport di Gresik itu, itu kan jadi ramai, Pak, seolah-olah masyarakat ini ada kesempatan sekitar 20 ribu orang. Padahal waktu nanti operasional, itu *kan* cuma 750 orang. Jadi inilah yang harus di, diterangkan ke masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nanti kalau di situ tidak tercipta lapangan kerja yang sangat besar *kan* juga kita sebagai orang dapil kan sering *ditanyain, gitu loh*. Itu, Pak, saya minta jawaban.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Pak Muslim, sekalian?

F- PD (MUSLIM, S.HI., M.M):

Sekalian, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Sebentar *aja* ya.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M):

Terakhir, sedikit, Pak Menteri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pimpinan dan teman-teman Anggota Komisi VI,
Pak Menteri,

Ini saya tidak mengulang apa yang disampaikan Pak Bahlil tadi, berkaitan Rempang dan lain-lain, saya pikir sudah dijelaskan. Ini berkaitan keberlangsungan KEK Arun ini, Pak Menteri. Ini terus-terang ini titipan dari masyarakat Aceh, yang waktu itu Pak Jokowi sudah hadir di sana dan meresmikan beberapa *project* strategis termasuk pabrik pupuk NPK. Hari ini memang satu-satunya lokasi yang betul-betul siap untuk investasi itu KEK Arun, Pak Menteri. Saya dengar sudah ada beberapa perusahaan yang sudah masuk di sana, tapi sampai hari ini memang kita belum lihat konkretnya, apalagi kalau saya lihat untuk tahun anggaran 2024 ini kan pagu indikatif kurang lebih 1,226 triliun, kita akan dukung sepenuhnya, Pak Menteri,

dengan target investasi dari 1.200 triliun, 1.400 triliun kita harapkan penyebaran investasi ini juga harus betul-betul dilihat. Aceh itu butuh betul *nih*, Pak Menteri, artinya yang memang sudah ada di depan mata kita itu KEK Arun. KEK Arun saya dengar sudah ada beberapa perusahaan asing yang sudah masuk, ini mohon dicek kembali, didorong untuk segera eksekusi karena di situ betul-betul yang sangat layak dan sangat tepat untuk investasi industri khususnya yang ada di Kota Lhokseumawe.

Yang kedua, di sana ada kampus besar kurang lebih mahasiswa hampir 30 ribu, mereka berharap Pak Menteri hadir untuk memberikan kuliah umum di sana. *Kenapa?* Karena itu juga letaknya persis di KEK Arun, Pak Menteri. Itu beberapa hal, Pak Ketua.

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Silakan, Pak Menteri.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Walaikumsalam,

Ini Pak Muslim ini sahabat saya, teman seperjuangan, cuma nasib kami, saya di kabinet dan beliau di parlemen, sama dengan Pak Sarmuji.

Pak Muslim, saya sangat memahami suasana kebatinan dari Pak Muslim sebagai orang Aceh, sebagai orang dapil dari sana. Saya tahu betul bahwa sudah beberapa investor yang masuk ke sana, kemudian beberapa juga mundur, salah satu di antaranya adalah Uni Emirat Arab. Saya sudah pernah ke Aceh waktu itu, banyak yang mereka memohonkan, tapi kemudian komunikasinya kemudian hilang, bukan hilang ya, tidak ada konfirmasi balik lagi. Dan untuk yang ada, kami coba fokus, nanti Pak Nurul sebagai Deputi Promosi dan Pak Yuliot tolong cek dan bantu teman-teman yang sudah mau masuk kepada KEK Arun. Dan saya tahu betul KEK Arun itu adalah sudah *clear and clean* sekali, bahkan saya juga pernah membantu untuk pengelolaannya dikembalikan kepada BUMD, yang tadinya itu di Kementerian Keuangan setiap lima tahun baru diperpanjang, sekarang sudah diserahkan kepada BUMD menjadi domain BUMD.

Yang kedua, menyangkut dengan mahasiswa tinggal Bapak sampaikan kepada saya saja, tanggal berapa, dengan syarat Pak Muslim juga harus hadir di sana, ya. Saya akan datang, saya juga *enggak ngerti* juga karena Pak Muslim suruh saya untuk di sana.

Yang menyangkut dengan Pak Khilmi, pertama, Pak, tenaga kerja yang ada itu kan ada dua, Pak, ada masa konstruksi dan pasca konstruksi. Memang kalau seperti di Lotte, seperti di Gresik, itu masa konstruksinya itu banyak, Pak, pasti banyak. Dua sampai tiga tahun selama masa konstruksi itu banyak sekali, tapi begitu selesai, karena ini *high* teknologi, pasti tenaga kerjanya tidak sebanyak itu. Karena yang mengontrol barang-barang ini, produk-produk tinggi ini, itu sudah alat, kerjanya *udah* robot dan itu *enggak* bisa digantikan, Pak. Itu, itu kalau kita gantikan dengan tenaga manusia dan itu kalau mereka mogok, dan atau tidak rapih, produknya *direject*. Jadi mohon maaf, ini juga sebuah tantangan untuk kami, Kementerian

Investasi. *Kenapa* tadi disampaikan bahwa antara nilai investasi dengan penciptaan lapangan pekerjaan, itu tidak berbanding lurus, jujur *aja*, karena dulunya kan kita fokus pada padat karya. Sekarang ini kalau kita bicara hilirisasi, industrialisasi, itu pasti teknologi. Dan nilai investasinya tinggi, produknya tinggi, tapi penyerapan tenaga kerjanya tidak sebaik itu, itu kira-kira kondisi *realnya*.

Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, kita kalau memang mau menciptakan nilai tambah, itu tidak ada cara lain, memang industri. Maka sekarang kita *blending*, bagian yang dikerjakan oleh tenaga manusia yang bisa, kita minta untuk itu dikerjakan oleh tenaga manusia. Tetapi, Pak, yang diingat itu bukan hanya persoalan kinerja perusahaan induk dalam konteks industrinya, tapi yang harus dilihat juga adalah berapa banyak kontraktornya, perusahaan-perusahaan yang di bawah yang *men-support*, itu kan penciptaan lapangan kerja juga, Pak. Berapa PPH Badan yang didapatkan juga, berapa PPN, itu juga bagian daripada penciptaan lapangan pekerjaan akibat masuknya investasi. Jadi saya selalu menganalogikan, investasi *gede* itu seperti kereta, ada lokomotif, ada gerbong. Lokomotifnya ini adalah yang besarnya, gerbongnya itu ya itu, *supplier*, kontraktornya, kemudian perusahaan-perusahaan lokalnya, itu yang ikut tertarik.

Kira-kira itu, Pak, jawaban saya, detailnya saya pikir perlu kami tulis *aja*, Pak, mohon maaf, Pak, saya belum tidur ini, Pak, jadi kalau boleh izin dengan tidak mengurangi rasa hormat kita, akhiri karena sudah lapar juga.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, agenda *emang udah* selesai, Pak Menteri. Jadi tanpa diminta Pak Menteri, kita akhiri.

Baik, kita tampilkan draf kesimpulan, Rapat Kerja Komisi VI DPR RI.

F- PKS (AMIN AK, M.M.):

Pertanyaan saya belum dijawab tadi itu, dijawab tertulis Pak Menteri ya, Pak, ya.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pak, Pak, mohon maaf tadi ya, yang menyangkut itu ya, Pak, sebentar, sebentar, sebentar.

F- PKS (AMIN AK, M.M.):

Hasil KTT ASEAN itu, Pak.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Pak Amin, menyangkut dengan KTT mohon maaf, mohon maaf. Kalau yang Rempang *udah ya*, Pak, ya

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Rempang semua *udah*.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Mohon maaf, Pimpinan, dua menit.

KTT ASEAN yang 650 triliun, Pak, kebetulan saya tidak ikut membahas itu, supaya jangan di, dikaitkan ke saya. Saya sendiri belum mendalami dan saya belum tanya kepada tim saya, karena pada saat perundingan, saya di forum yang lain. Tetapi tidak ada alasan sebenarnya untuk saya tidak bisa menjawab itu ketika materinya sudah ada. Tapi daripada saya jawab salah, saya tunggu tim saya untuk memberikan saya, baru kami akan kasih ke Pak Amin.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Tertulis *aja*, tertulis.

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Tertulis ya, *makasih*.

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik, saya bacakan draf kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi RI, 13 September 2023.

Pertama, ini *udah* pasti *enggak* ada yang lain, selain setuju.

1. Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun anggaran 2024 sesuai surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B dan seterusnya tanggal 11 September 2023 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2024 sebesar Rp1.229.295.942.000,00. Sesuai surat Badan Anggaran DPR RI tersebut, Komisi VI DPR RI meminta agar Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dapat segera menyampaikan penyesuaian anggaran per program paling lambat 14 September 2023 untuk selanjutnya akan disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI.

Setuju ya, Pak Menteri?

(KETUK PALU 1 KALI)

2. Komisi VI DPR RI, ini *concern* kita sama-sama tadi agak penting lalu kita masukan dalam kesimpulan,

Komisi VI DPR RI meminta Menteri Investasi/Kepala BPKM RI untuk memberikan perhatian khusus terkait kasus lahan di Pulau Rempang Batam, Kepulauan Riau dengan segera mengunjungi lokasi tersebut agar terjadi rekonsiliasi dan mengkomunikasikan kebijakan Pemerintah dengan baik pada semua pihak terkait.

Setuju ya, Pak Menteri?

(KETUK PALU 1 KALI)

3. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk memberikan jawaban tertulis dalam waktu paling lama 5 hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

(KETUK PALU 1 KALI)

Pak Menteri, ada *closing statement*?

MENTERI INVESTASI/KEPALA BPKM RI (BAHLIL LAHADALIA, S.E.):

Tidak ada

KETUA RAPAT (M. SARMUJI, S.E., M.SI./WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI):

Baik. Dengan demikian rapat ini bisa kita akhiri.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin*, rapat ditutup.

**(KETUK PALU 3 KALI)
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.12 WIB)**

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

TTD.

DEWI RESMINI, S.E., M.Si.
NIP. 197104071992032001